



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERONIKA WIJAYANTI
2. Jabatan : KEPALA URUSAN PERBENDAHARAAN
3. NHK : 254979

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	512.500.000
1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA F1CO2N28LO AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
3. MOBIL, FORTUNER TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.010.235.877
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.972.735.877
III. HUTANG	Rp.	62.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.910.735.877

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.